
Daftar Isi

Tinjauan Teoritik tentang Semiotik

Ni Wayan Sartini

1-10

Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi

Doddy Sumbodo Singgih

11-21

Masalah Birokrasi sebagai Pelayan Publik

Gatot Pramuka

22-30

Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan

Siti Aminah

31-45

Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur

I.B. Wirawan

46-56

Komitmen dan Konsistensi Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan: Analisis Kasus di Jawa Timur

Karnaji

57-68

Memahami Dunia Politik melalui Karya Sastra:

Tinjauan Resepitif terhadap Hikayat Kalilah dan Dimmah

Mochtar Lutfi

69-74

Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi

Doddy Sumbodo Singgih
Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Social stratification is a concept that can be useful in analyzing both society and state system. In order to have a useful analysis, however, it needs a proper procedure, which allows it to be applied in various targets. By so doing, the result of analysis could be useful for either a community or those who wish to be agent of social, economical, political, and even cultural change.

Key words: *systemic analysis, social stratification, community.*

Per definisi, stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai — baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya — dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial (komunitas) ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, dan dalam suatu kelompok sosial (komunitas) pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok sosial

(komunitas) tersebut. Secara sosiologis —jika dilacak ke belakang— konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf (1986), diperkenalkan pertama kali oleh penguasa Romawi Kuno. Pada waktu itu, istilah kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat terhadap para pembayar pajak. Ketika itu ada dua masyarakat, yaitu masyarakat golongan kaya dan miskin.

Pada abad ke-18, istilah kelas sosial digunakan oleh ilmuwan Eropa dalam pengertian yang berbeda, yaitu digunakan dalam pengertian sebagai status sosial atau kedudukan. Dengan kata lain, istilah kelas sosial dan status sosial dianggap sama. Pada abad ke-19, istilah kelas sosial mulai digunakan dalam analisis kesenjangan sosial yang berakar dari kondisi ekonomi suatu masyarakat. Akhirnya sejak Marx mengajukan konsepnya tentang kelas

sosial penggunaan istilah ini dibedakan dengan istilah status sosial.

Dalam studi-studi sosiologi kontemporer, istilah status sosial dikaitkan dengan istilah peran (*role*), di mana kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang bersifat ko-eksistensial (Beteille, 1977). Misalnya, jika ada status sosial tentu akan ada peran sosial, semakin tinggi status sosial semakin banyak peran sosialnya, atau semakin tinggi status sosial semakin sedikit peran sosialnya.

Perbedaan secara tegas antara kelas sosial dan status sosial antara lain dikemukakan Max Weber dengan mengajukan konsep tentang kelas sosial, status sosial dan partai. Menurut Weber, kelas sosial merupakan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hubungan produksi dan penguasaan kekayaan. Sedangkan status sosial merupakan manifestasi dari stratifikasi sosial yang berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh komunitas dalam mengkonsumsi kekayaannya dan/atau gaya hidupnya. Partai merupakan perkumpulan sosial yang berorientasi penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi suatu tindakan sosial tertentu.

Konsep Weber tentang kelas sosial merupakan perluasan dari konsep Marx. Menurut Marx, kelas sosial merupakan himpunan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas sosial dalam komunitas dibedakan berdasarkan perbedaan posisinya dalam tatanan ekonomi, yaitu pembedaan dalam posisinya dalam penguasaan alat-alat produksi. Weber menggunakan istilah kelas sosial dalam pengertian seperti yang digunakan Marx, dengan menambahkan dua faktor, yaitu kemampuan individu dan situasi pasar. Menurut Weber: pertama,

kelas merupakan himpunan manusia yang berada dalam situasi yang sama; kedua, kelas bukan merupakan sebuah komunitas

Dimensi Stratifikasi Sosial

Ada banyak dimensi yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan stratifikasi sosial yang ada dalam suatu kelompok sosial atau komunitas (Svalastoga, 1989), misalnya: dimensi pemilikan kekayaan (diteorikan Koentjaraningrat), sehingga ada strata *wong sugih* dan *wong cilik*. Awalnya, dimensi ini digunakan untuk melakukan identifikasi pada masyarakat Jawa, maka yang disebut pemilikan kekayaan akan terfokus pada simbol-simbol ekonomi yang lazim dihargai masyarakat Jawa. Misalnya, pemilikan tanah (rumah, pekarangan atau sawah).

Dimensi distribusi sumber daya diteorikan oleh Gerhard Lensky, di mana ada strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang, strata pegawai, strata petani, strata pengrajin, strata pengangguran, dan strata pengemis. Dimensi ini pada awalnya diberlakukan pada masyarakat pra-industri di mana sistem stratifikasi sosialnya belum sekompleks masyarakat industri. Ada tujuh dimensi stratifikasi sosial (diteorikan Bernard Baber), yaitu: *occupational prestige, authority and power ranking, income or wealth, educational and knowledge, religious and ritual purity, kinship, ethnics group, and local community*. Ketujuh dimensi ini, baik secara terpisah maupun bersama-sama, akan bisa membantu dalam mendeskripsikan bagaimana susunan stratifikasi sosial suatu kelompok sosial (komunitas) dan faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial tersebut.

Samuel Huntington mengemukakan bahwa ada dimensi modernisasi untuk menjelaskan stratifikasi sosial, yaitu: strata sosial (baru) yang mampu merealisasi aspirasinya (*the new have*) dan strata sosial yang tidak mampu merealisasi aspirasinya atau mereka kalah dalam memperebutkan posisi strata dalam komunitasnya (*the looser*). Dimensi ini lebih terfokus pada stratifikasi sosial yang pembentukannya didasarkan pada berbagai simbol gaya hidup. Teorisi Huntington ini dalam beberapa hal berhimpitan dengan teori *Leisure Class*-nya dari Thorstein Veblen (Beteille, 1977).

Sistem Analisis

Ada banyak sistem analisis stratifikasi sosial yang saat ini lazim digunakan dalam studi-studi sosiologi kontemporer, misalnya pertama, menganalisis sistem pertentangan (konflik) yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Analisis ini diarahkan untuk mengurai apakah ada dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial yang diperebutkan oleh kelompok sosial (komunitas). Mereka yang berhasil merebut sesuatu yang berharga atau bernilai dalam kelompok sosial (komunitas) tersebut akan menduduki strata atas, sedangkan mereka yang tidak berhasil merebut akan menduduki strata bawah.

Kedua, menganalisis sistem distribusi hak-hak istimewa (penghasilan, kekayaan, kesehatan, kewenangan) yang ada dan/atau berkembang dalam kelompok sosial (komunitas). Analisis ini agak sama dengan analisis butir pertama di atas, hanya bedanya faktor yang digunakan untuk analisis tampak lebih terbatas.

Ketiga, menganalisis sistem penghormatan (*prestige* dan *reward*) yang diciptakan oleh kelompok sosial (komunitas). Analisis ini diarahkan pada respon yang diberikan pada kelompok tertentu, dengan mengutamakan interaksi sosial yang terbentuk. Keempat, menganalisis alasan-alasan konflik yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), apakah alasannya berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok dalam kekerabatan tertentu, pemilikan, benda-benda ekonomi, kewenangan atau kekuasaan. Kelima, menganalisis simbol-simbol kedudukan tertentu yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misal cara berpakaian, model perumahan, keanggotaan organisasi, perilaku sosial secara khusus. Keenam, menganalisis sirkulasi kedudukan yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya: apakah sirkulasinya cepat, lambat atau bahkan tidak ada sirkulasi. Dan ketujuh, menganalisis solidaritas individual atau kelompok yang ada dan/atau berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya, apakah solidaritasnya berkembang berdasarkan ikatan fungsional atau nilai-nilai tertentu.

Apa pun sistem analisis stratifikasi sosial yang kita pilih, studi-studi stratifikasi sosial dalam sosiologi telah berkembang pesat dengan meletakkan stratifikasi sosial sebagai variabel X (independen) maupun sebagai variabel Y (dependen), tergantung tipe analisis apa yang digunakan. Oleh karena itu, agar analisis kita tidak dangkal, kita juga perlu mencermati konsep-konsep yang berhimpitan dengan konsep stratifikasi sosial, misalnya konsep tentang kemiskinan (miskin atau sangat miskin), kesenjangan (lebar atau sempit),

deferensiasi (apa dasar terbentuknya), polarisasi (apa dasar terbentuknya), atau konsep-konsep lain yang berkaitan dengan situasi yang hierarkhis dalam suatu kelompok sosial.

Beberapa konsep tersebut berhimpitan dengan konsep stratifikasi sosial, karena dalam kenyataannya stratifikasi sosial bisa muncul sebagai faktor yang mempengaruhi (variabel X), atau faktor yang dipengaruhi (variabel Y). Misalnya, stratifikasi sosial bisa mempengaruhi kemiskinan, tapi sebaliknya, kemiskinan juga bisa mempengaruhi stratifikasi sosial.

Dalam kenyataan sosial biasanya simbol-simbol yang dihargai atau dinilai dan digunakan sebagai dasar untuk membentuk stratifikasi sosial dalam suatu kelompok sosial (komunitas) akan bersifat kumulatif. Ini berarti ketika melakukan analisis stratifikasi sosial harus menggunakan *scoring* untuk setiap simbol yang dihargai atau dinilai, kemudian menjumlahkan skor-skor tersebut. Deskripsi stratifikasi sosial selain akan berupa frekuensi dari masing-masing strata dalam suatu kelompok sosial yang dikemukakan dalam suatu tabel frekuensi, bisa juga dideskripsikan melalui skema piramida atau bentuk lain yang menggambarkan susunan secara bertingkat.

Fungsi Lahan

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fungsi lahan dalam analisis stratifikasi sosial sangatlah kompleks, setidaknya-tidaknya jika dilihat dari dimensi sosiologis, dimensi ekonomi (pertanian) maupun dimensi ekologi (manusia) (Amaluddin, 1987; Maeda & Matulada, 1984; Sutanto, 2006; Tjondronegoro & Gunawan, 1984). Jika dilihat dari dimensi sosiologis, fungsi lahan

bisa dianalisis secara struktural dan/atau kultural, misalnya, jika dilihat dari dimensi ekonomi (pertanian), fungsi lahan bisa analisis dari pola-pola manajemen usaha tani yang dilakukan petani. Sedangkan jika dilihat dari dimensi ekologi (manusia), fungsi lahan bisa dianalisis dari situasi hubungan ko-eksistensial antara sistem sosial dengan ekosistem, dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan yang dinamis (*steady state*).

Dilihat dari dimensi sosiologis, fungsi lahan —baik dalam pengertiannya sebagai media tanam (*soil*) maupun sebagai ruang (*space*)— memang sangatlah kompleks. Misalnya, ketika manusia baru mengenal usaha tani secara monokultur, maka fungsi lahan tidak hanya sebagai media bercocok tanam secara subsisten saja, namun juga sebagai salah satu instrumen untuk membentuk stratifikasi sosial, struktur sosial, pranata sosial, sub-kebudayaan, dan berbagai perangkat sosial lainnya.

Kompleksnya fungsi lahan dalam pengertiannya sebagai media tanam (*soil*) tersebut bisa dilihat, misalnya: dari masalah ketimpangan rasio antara manusia dengan lahan (*manland ratio*), meningkatnya kepadatan fisik (*physical density*) dan kepadatan agraris (*agricultural density*) pada suatu daerah, dan menyempitnya rata-rata luas pemilikan dan/atau penguasaan lahan pertanian dalam setiap rumah tangga tani, yang digunakan untuk usahatani.

Kekompleksan fungsi lahan dalam pengertiannya sebagai ruang (*space*) bisa dilihat misalnya dari makin mengecilnya daya dukung (*carrying capacity*) lahan terhadap kebutuhan kehidupan manusia, alih-fungsi lahan yang melebihi ambang-batas, dan penggunaan lahan marjinal untuk membangun infrastruktur kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam sosiologi,

analisis fungsi lahan dalam stratifikasi sosial seyogianya dikaitkan dengan perspektif teori yang digunakan.

Setidak-tidaknya ada lima perspektif teori untuk menganalisis fungsi lahan dalam stratifikasi sosial, yaitu: pertama, perspektif fisiokrat (dipopulerkan oleh Francois Quesnay); kedua, perspektif klasik (dipopulerkan oleh David Ricardo); ketiga, perspektif ekonomi moral (dipopulerkan James C. Scott); keempat, perspektif ekonomi politik (dipopulerkan oleh Samuel L. Popkin); dan kelima, perspektif ekologi manusia (dipopulerkan oleh A. Terry Rambo).

Dalam perspektif fisiokrat, lahan dianggap sebagai sumber daya pertanian yang memiliki hasil lebih (*produit net*), dan hasil lebih tersebut didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat, sesuai dengan posisinya dalam stratifikasi sosial. Oleh karena itu, menurut perspektif ini, masalah utamanya terletak pada bagaimana manusia mengeksploitasi lahan sebagai salah satu faktor produksi, yang hasilnya kemudian didistribusikan ke seluruh stratifikasi sosial yang ada dalam suatu masyarakat (komunitas), untuk dikonsumsi dan untuk melakukan produksi lagi. Dalam konteks ini, fungsi lahan sangat mungkin mengalami persegeraan dalam suatu masyarakat (komunitas), jika struktur stratifikasi sosial dalam masyarakat (komunitas) tersebut juga mengalami pergeseran.

Dalam perspektif klasik, lahan dianggap sebagai sumber daya yang bisa menghasilkan sewa lahan (*rent*). Tinggi atau rendahnya *rent*, sangat tergantung pada harga komoditas yang diproduksinya. Misalnya, makin mahal harga beras akan makin tinggi *rent*-nya dan sebaliknya. Dalam perkembangannya, perbedaan *rent*

(*differential rent*) ini tidak hanya dilihat dari perbedaan kesuburan lahan saja, namun juga dilihat dari perbedaannya dengan letak pasar. Akibat besarnya permintaan produksi pertanian dan makin banyaknya petani melakukan usaha tani yang sama, maka akan menyebabkan *rent* tersebut menjadi naik, dan akhirnya terjadilah kelangkaan lahan (*scarcity rent*). Oleh karena itu, pada akhirnya, perbedaan *rent* ini juga akan menjadi salah satu faktor atas terjadinya pergeseran dan/atau perubahan dalam stratifikasi sosial, di mana hanya strata atas yang lebih memiliki akses untuk memiliki dan/atau menguasai lahan yang menghasilkan *rent* yang tinggi. Dalam perspektif ekonomi moral, lahan dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menjalin hubungan sosial yang berlandaskan pada moralitas.

Dalam konteks ini, moralitas menjadi indikator untuk mengukur baik atau buruknya jalinan hubungan sosial. Misalnya, di kalangan masyarakat tani, adanya fenomena komersialisasi pertanian diyakini akan menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antarstratifikasi sosial. James C. Scott (1979), misalnya, merumuskan adanya enam proposisi yang menjelaskan hubungan antara komersialisasi pertanian dengan perubahan hubungan antarstratifikasi sosial di pedesaan, yaitu: pertama, ketidakmerataan yang makin besar dalam pemilikan lahan, menyebabkan penguasaan lahan menjadi dasar utama bagi kekuasaan; kedua, penambahan penduduk menyebabkan kedudukan pemilik lahan dalam menghadapi penyewa dan/atau buruh tani menjadi lebih kuat; ketiga, fluktuasi harga produsen, konsumen dan penetapan harga pasar menyebabkan kedudukan pemilik lahan menjadi lebih kuat; keempat, hilangnya

sumber matapencaharian di waktu luang menyebabkan hilangnya alternatif yang memperlemah kedudukan penyewa lahan dalam menghadapi pemilik lahan; kelima, memburuknya mekanisme distribusi menyebabkan hilangnya alternatif yang memperlemah kedudukan penyewa lahan dalam menghadapi pemilik lahan, dan keenam, negara kolonial yang melindungi hak milik para pemilik lahan menyebabkan pemilik lahan kurang membutuhkan klien yang setia.

Dalam perspektif ekonomi politik, lahan dianggap sebagai salah satu sumber daya untuk melakukan suatu “permainan politik”. Artinya, suatu permainan yang memungkinkan petani memperoleh keuntungan, terutama dalam kapasitasnya sebagai *freerider*. Menurut Popkin (1979), setidaknya-tidaknya ada empat “permainan politik” yang lazim dilakukan dan/atau menjadi bahan pertimbangan petani, baik petani yang berada di posisi strata atas, strata tengah maupun strata bawah, yaitu: pertama, seberapa besar sumber daya yang telah dikeluarkan; kedua, keuntungan apa yang akan diperolehnya, ketiga, ada atau tidaknya peluang untuk melakukan tindakan dalam memperoleh keuntungan; keempat, ada-tidaknya pimpinan yang mampu memobilisasi sumber daya yang tersedia?

Dalam perspektif ekologi (manusia), lahan dianggap sebagai salah satu sumber daya yang bisa ditransformasikan ke dalam suatu sistem sosial. Seperti dijelaskan oleh A. Terry Rambo (1981), bahwa antara sistem sosial dengan ekosistem terjalin hubungan yang harmonis, di mana kedua sistem tersebut saling mentransformasikan energi, materi dan informasi untuk mencapai keseimbangan yang dinamis (*steady state*). Masalah hubungan antara kedua sistem ini, akan ditentukan oleh besarnya unit

sumber daya (lahan) yang dimiliki. Makin besar sumber daya (lahan) yang dimiliki atau makin tinggi strata sosialnya, tentu akan makin besar pula kapasitasnya dalam melakukan transformasi energi, materi dan informasi.

Kelima perspektif teori tentang lahan tersebut—baik secara terpisah maupun bersama-sama—akan mempengaruhi bagaimana sistem analisis dalam studi stratifikasi sosial. Misalnya, dalam analisis sosiologi, lahan dianggap sebagai salah satu sumber daya yang memiliki potensi sebagai pembentuk dan/atau perubah stratifikasi sosial. Dalam studi ini akan dilakukan analisis secara struktural: (1) seberapa besar terjadi pergeseran stratifikasi sosial; (2) dampak apa saja yang ditimbulkan dari pergeseran stratifikasi sosial tersebut? Jika merujuk Scott maka akan dianalisis: apakah pergeseran stratifikasi sosial mempengaruhi hubungan patron-klien? Jika merujuk Popkin maka akan dianalisis: apakah pergeseran stratifikasi sosial akan mempengaruhi “pola permainan politik” petani?

Lebih jauh daripada itu, karena lahan juga memiliki fungsi ekonomi, di mana lahan dianggap sebagai sumber daya produktif untuk melakukan usaha tani, maka akan dianalisis: tentang karakteristik usaha tani, yang meliputi aliran pendapatan dan/atau pengeluaran keluarga tani, analisis tentang rasio keuntungan dan kerugian (*B/C ratio*) usaha tani, analisis rasio pengembalian modal (*R/C ratio*) dalam usaha tani, dan analisis tentang fungsi produksi.

Sementara itu, untuk analisis kultural, dimensinya tidak akan jauh beda dengan analisis secara struktural, yaitu: (1) melihat unsur-unsur apa saja dari kultur petani yang mengalami pergeseran; (2) dampak apa saja yang timbul dari pergeseran tersebut?

(lihat: konsep Everett M. Rogers tentang *The Subculture of Peasantry*). Meski antara struktur dan kultur merupakan dua konsep yang beda, namun keduanya merupakan satu kesatuan konsep (*two face of one coin*) dalam analisis stratifikasi sosial. Artinya, perubahan-perubahan dalam sesuatu yang dihargai dan/atau dinilai dalam suatu masyarakat (komunitas), yang kemudian menjadi instrumen dasar dalam membentuk stratifikasi sosial, sebenarnya tidak terlepas dari nilai-nilai kultural yang menjadi acuan dalam masyarakat (komunitas) tersebut.

Oleh karena itu, agar diperoleh hasil analisis stratifikasi sosial yang komprehensif, seyogianya kita tidak hanya menggunakan satu perspektif saja, apalagi jika yang kita analisis adalah sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami transformasi, baik di pedesaan, perkotaan maupun *interface* antara pedesaan dan perkotaan. Pengertian lahan sebagai *soil* misalnya, dalam realita sosial saat ini juga sedang mengalami pergeseran, karena fungsi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh rata-rata luas penguasaan lahan saja, namun juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas lahan. Ini berarti, pengertian lahan sebagai *soil* dan sebagai *space* sebenarnya saling tumpang-tindih, apalagi jika digunakan untuk menganalisis stratifikasi sosial.

Prosedur Pengukuran

Pada umumnya dalam kehidupan bermasyarakat selalu akan ada kategorisasi anggota komunitasnya berdasarkan skala superioritas atau inferioritas, karena memang dalam kenyataannya akan selalu ada suatu perbedaan-perbedaan di antara mereka secara signifikan (Hasbullah, 2006). Perbedaan-perbedaan itulah yang

menjadi awal dari munculnya kategorisasi tersebut. Kategorisasi secara vertikal inilah yang kemudian membentuk suatu stratifikasi sosial dalam komunitas itu.

Dalam melakukan pengukuran stratifikasi sosial akan berlaku asumsi-asumsi bahwa: pertama, ada perbedaan strata dan perbedaan tersebut akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial di dalam komunitas. Kedua, hubungan antara aktivitas sosial dengan integrasi antar-kelompok akan berbentuk kurve linier. Dan ketiga, ada korelasi yang negatif antara integrasi antar-kelompok dengan perbedaan dalam strata.

Untuk melakukan pengukuran stratifikasi sosial dengan dengan unit analisis individu, sedikit-tidaknya akan dilakukan dengan empat cara (dimensi), yaitu: pertama, melakukan pengukuran stratifikasi sosial dengan cara menilai diri sendiri (*self ranking*). Cara pengukuran seperti ini disebut sebagai pengukuran secara subyektif. Kedua, melakukan pengukuran stratifikasi sosial dengan cara menilai posisi seseorang dalam komunitas. Cara pengukuran seperti ini disebut sebagai pengukuran secara obyektif. Ketiga, melakukan pengukuran stratifikasi sosial dengan menggunakan indikator-indikator interaksi. Cara pengukuran ini disebut sebagai pengukuran secara intersubyektif. Dan keempat, melakukan pengukuran stratifikasi sosial dengan menggunakan indikator-indikator secara khusus.

Pengukuran stratifikasi sosial dengan menggunakan cara penilaian diri sendiri artinya, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan kepada responden, untuk menilai status sosial mereka sendiri. Dalam praktek di lapangan, pada umumnya menggunakan pertanyaan yang bersifat *open-ended questions*, para responden cenderung akan menempatkan dirinya

(menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner) tersebut pada posisi tengah.

Pengukuran stratifikasi sosial yang menggunakan cara pengukuran komunitas adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sejumlah informan yang secara sengaja dipilih, untuk menilai status sosial seseorang (orang lain). Wawancara ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui berapa jumlah strata sosial yang diakui oleh komunitas; dan kedua, mengetahui di mana seseorang sebagai anggota komunitas ditempatkan pada strata sosial?

Untuk melakukan pengukuran ini, setidaknya-tidaknya ada enam dimensi pertanyaan standar yang harus dikemukakan, yaitu: pertama, pertanyaan yang digunakan untuk mencocokkan, artinya: pertanyaan tersebut ditujukan untuk mencocokkan suatu data atau informasi, misalnya: apakah posisi sosial seseorang anggota komunitas memang pas, sesuai dengan pengukuran komunitasnya. Kedua, pertanyaan yang digunakan untuk menempatkan secara simbolis, artinya: pertanyaan tersebut mengarah pada ada-tidaknya simbol-simbol tertentu yang melekat pada seseorang anggota komunitas. Misalnya: seseorang (X) adalah orang miskin yang hidup dalam lingkungan yang kumuh. Ketiga, pertanyaan yang digunakan untuk melihat reputasi status sosial, artinya: pertanyaan ini diarahkan untuk melihat bagaimana reputasi seseorang dalam komunitas. Misalnya: dengan menanyakan apakah seseorang (X) adalah orang miskin, tetapi dia jujur? Keempat, pertanyaan yang membandingkan, artinya: pertanyaan tersebut berupa pertanyaan perbandingan antar-status sosial. Misalnya: dengan menanyakan apakah status sosial seseorang (X) lebih tinggi daripada status sosial seseorang yang lain

(Y)? Kelima, pertanyaan yang digunakan untuk menetapkan secara sederhana, artinya: pertanyaan tersebut mengarah pada penetapan posisi status. Misalnya: dengan menanyakan apakah seseorang (X) adalah termasuk ke dalam strata menengah? Dan keenam, pertanyaan yang digunakan untuk melihat keanggotaan dalam kelembagaan, artinya: pertanyaan tersebut berupa pertanyaan tentang keanggotaan seseorang dalam suatu lembaga. Misalnya: dengan menanyakan apakah seseorang (X) adalah anggota suatu lembaga tertentu, yang memiliki strata tertentu dalam komunitas?

Cara pengukuran stratifikasi sosial dengan menggunakan indikator interaksi artinya, mengukur stratifikasi sosial dengan melihat pola interaksi sosial yang terjadi antar-kelompok dalam komunitas. Pola interaksi ini ada dua, yaitu: pertama, interaksi yang saling membedakan antar-kelompok, misalnya: dengan memperhatikan bentuk-bentuk/symbol yang digunakan dalam interaksi); dan kedua, interaksi yang saling mempengaruhi antar-kelompok, misalnya: dengan melihat cara seseorang diperlakukan oleh orang lain. Sedangkan cara pengukuran stratifikasi sosial dengan menggunakan indikator secara khusus artinya, mengukur stratifikasi sosial dengan cara menggunakan indikator yang secara sengaja (khusus) dirumuskan. Misalnya, dengan menggunakan indikator: pertama, pekerjaan yang dilakukan (jenis, gengsi, jabatan); kedua, penghasilan yang diperoleh (jumlah, jenis tunjangan, aliran dana); ketiga, keadaan kondisi perumahan (tipe, model, kualitas bangunan); dan keempat, kawasan tempat tinggal/perumahan (kawasan elite, kumuh).

Apa pun cara yang digunakan untuk mengukur stratifikasi sosial, biasanya

scoring digunakan, apalagi jika pengukuran tersebut menggunakan banyak indikator. Prosedur *scoring* ini untuk melihat berapa banyak *score* yang dimiliki seseorang, setelah menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan tentang di mana posisi sosial mereka. Sehingga pada akhirnya akan tampak di mana sebenarnya posisi sosialnya. Untuk menghasilkan pengukuran stratifikasi sosial yang valid dan *reliable* seyogianya menggunakan keempat dimensi tersebut secara bersama-sama. Artinya, pengukuran tersebut menggunakan cara penilaian diri sendiri, menggunakan cara penilaian komunitas, menggunakan indikator interaksi antar-kelompok, dan menggunakan indikator secara khusus. Keempat dimensi ini kemudian perolehan *score*-nya digabung.

Secara prinsip cara penggabungan *score* ini tidak berbeda dengan cara penggabungan *score* dalam proses analisis data kuantitatif pada umumnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, lebih dulu definisikan konsep-konsep yang digunakan untuk mengukur stratifikasi sosial. Kedua, tentukan *score* dari masing-masing jawaban yang diberikan responden sesuai konsep/teori yang digunakan. Ketiga, lakukan pengumpulan data, atas sejumlah responden tertentu. Keempat, lakukan analisis data (penggabungan *score*). Kelima, tarik suatu kesimpulan, yang memperlihatkan di mana posisi hierarkhis seseorang dalam komunitas. Penggabungan *score* dilakukan dengan cara masing-masing *score* dalam setiap jawaban yang paling tinggi dijumlah dan yang paling rendah juga dijumlah. Kemudian dicari selisihnya (*range*)nya untuk menentukan berapa intervalnya. Setelah interval ditemukan, masing-masing perolehan *score* responden bisa ditentukan di mana posisinya.

Parameter Pengukuran

Dalam setiap teori stratifikasi sosial ada perbedaan parameter yang digunakan untuk mengukur stratifikasi sosial. Namun secara umum dikenal ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur stratifikasi sosial, yaitu: pertama, dengan menggunakan parameter distributif. Artinya, deskripsi stratifikasi sosial pada suatu kelompok sosial (komunitas) dilakukan dengan cara mengukur distribusi barang dan/atau jasa. Misalnya: adanya stratifikasi sosial dalam sistem penggajian karyawan, merupakan bukti adanya ketidakmerataan distribusi barang dan/atau jasa dalam kelompok sosial (komunitas) ini. Kedua, dengan menggunakan parameter korelatif. Artinya, deskripsi stratifikasi sosial pada suatu kelompok sosial (komunitas) dilakukan dengan cara mengkorelasikan berbagai faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Misalnya: adanya stratifikasi sosial karena adanya hubungan yang korelasional antar faktor-faktor yang membentuk stratifikasi sosial.

Dalam realitanya, mereka yang menduduki strata sosial atas adalah mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki pendidikan tinggi dan memiliki jabatan. Dan ketiga, dengan menggunakan parameter tingkat perubahan. Artinya, deskripsi stratifikasi sosial pada suatu kelompok sosial (komunitas) dilakukan dengan cara mengukur kecepatan perubahan dan implikasi sosialnya. Misalnya, adanya stratifikasi sosial karena adanya perubahan yang memiliki implikasi sosial. Semakin perubahan tersebut tidak memiliki implikasi sosial, maka semakin memperlambat perubahan stratifikasi sosial.

Apa pun parameter yang digunakan untuk mengukur stratifikasi sosial,

pada umumnya studi-studi sosiologi kontemporer memfokuskan pada aspek mobilitas antar-stratanya. Artinya, dalam stratifikasi sosial tersebut dilihat apakah ada kemungkinan dan/atau sejauhmana bisa terjadi gerak (perubahan) antar-strata yang ada. Posisi strata bawah akankah bisa bergerak menjadi (berada) strata tengah, dsb. Mobilitas antar-strata tersebut dianggap rendah jika faktor kelahiran dan kematian sangat menentukan posisi individu dalam stratifikasi sosial (lihat: perbedaan konsep *ascribed status* dan *achieved status*). Sebaliknya, mobilitas sosial antar-strata dianggap tinggi jika posisi individu tidak tergantung pada kelahiran atau kematian. Ditinjau secara teoritis, tinggi-rendahnya mobilitas antar-strata tergantung pada model stratifikasi sosial yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kelompok sosial (komunitas).

Secara umum dikenal lima model stratifikasi sosial, yaitu: pertama, model kasta, di mana dalam model ini tingkat mobilitas antar-stratanya tidak dimungkinkan (nol). Kedua, model strata, di mana dalam model ini tingkat mobilitas antar-stratanya rendah. Ketiga, model kelas, di mana dalam model ini tingkat mobilitas antar-stratanya menengah. Keempat, model kontinum, di mana dalam model ini tingkat mobilitas antar-stratanya agak tinggi. Dan kelima, model egalitarian, di mana dalam model ini tingkat mobilitas antar-stratanya sangat tinggi.

Dalam menganalisis kelima model stratifikasi sosial yang ada dalam suatu kelompok sosial (komunitas), pada umumnya kita jarang menggunakan konsep interaksi dan integrasi, yang merupakan dua faktor yang sangat signifikan dan *inherent* dalam stratifikasi sosial. Misalnya, kita jarang menganalisis: apakah kesamaan status sosial akan cenderung

menyebabkan tingginya frekuensi interaksi sosial kalangan mereka? Atau: apakah mereka yang memiliki status sosial yang sama akan cenderung melakukan integrasi atau disintegrasi dalam komunitasnya? Interaksi sosial di sini tidak dimaksudkan untuk melihat benar atau tidaknya hubungan antar-strata, namun sebagai asumsi bahwa interaksi sosial tersebut akan memberikan implikasi hubungan antar-strata. Misalnya, mereka akan melakukan interaksi, karena mereka dalam kondisi yang saling menguntungkan. Dengan kata lain: interaksi sosial di antara kedua strata tersebut bersifat simbiosis mutualisme. Jika mereka yang melakukan interaksi sosial tersebut dalam posisi statusnya sama (sama-sama tinggi atau sama-sama rendah), maka interaksinya disebut sepadan. Namun, jika interaksi tersebut terjadi karena adanya pilihan mereka sendiri (mungkin berbeda status) yang diperkuat dengan ikatan bersama, maka interaksi sosial tersebut disebut konsensus. Dalam konteks ini, adalah wajar terjadi jika intensitas interaksi sosial akan terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran akan status. Interaksi sosial tersebut akan menurun frekuensinya, seiring dengan meningkatnya perbedaan status antar mereka yang melakukan interaksi sosial (lihat: bagaimana terjadinya proses deferensiasi dan polarisasi sosial, akibat dari adanya kesenjangan antar-strata sosial yang semakin lebar).

Untuk mengintegrasikan individu yang mengelompok secara longgar ke dalam suatu kelompok solidaritas diperlukan interaksi sosial yang intensif. Secara teoritis sering dikemukakan bahwa integrasi akan lebih besar kemungkinannya ditemukan dalam kelompok yang perubahan sosialnya relatif lambat, karena lambatnya perubahan sosial itu memberikan kesempatan pada

individu untuk menempati posisi yang sama dalam waktu yang relatif lama. Model stratifikasi sosial yang berbentuk kasta, strata, dan kelas hanya akan berkembang menjadi kelompok yang terintegrasi jika ada kondisi khusus yang menyertai. Pada masyarakat industri misalnya, umumnya integrasi sosial dalam kelompok-kelompok besar sangat tergantung pada adanya organisasi yang otonom yang menjembatani terjadinya interaksi antar-kelompok. Organisasi otonom ini berfungsi sebagai penengah atas adanya perbedaan antar-strata, misalnya: antara strata penguasa (pemerintah) dengan strata bawah (buruh). Saat ini, untuk melakukan studi tentang stratifikasi sosial tidak hanya akan berkaitan dengan cara-cara pengukurannya saja, namun juga berkaitan dengan mobilitas antar-strata dan implikasi-implikasi dari mobilitas antar-strata tersebut, terutama dilihat dari dimensi interaksi dan integrasi sosialnya.

Daftar Pustaka

- Amaluddin, Moh., *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah* (Jakarta: UI Press, 1987).
- Beteille, Andre, *Inequality among Man* (London: Basil Blac Well, 1977).
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Konflik Kelas dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: CV Rajawali, 1986).
- Dewanta, Awan Setya (ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).
- Laeyendecker, L., *Tata, Perubahan dan Ketimpangan* (Jakarta: PT Gramedia, 1983).
- Maeda, Narifumi & Matulada, *Transformation of the Agricultural Landscape in Indonesia* (Kyoto: Center for South East Asian Studies, Kyoto University, 1984).
- Popkin, Samuel L., *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (California: California University Press, 1979).
- Rambo, A. Terry, *Conceptual Approaches to Human Ecology* (Honolulu: East-West Environment and Policy Institute, 1981).
- Salim, Agus, *Stratifikasi Etnik: Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Scott, James C., *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South East Asia* (New Haven: Yale University Press, 1979).
- Sutanto Jusuf & Tim (ed.), *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006).
- Svalastoga, Kaare, *Social Differentiation* (Seattle: University of Washington, 1989).
- Tjondronegoro, Sediono M.P. & Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian dari Masa ke Masa* (Jakarta: PT Gramedia, 1984).